



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2024**



MANOKWARI, JANUARI 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

Seiring dengan terlaksananya program kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat di Tahun Anggaran 2024, maka sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaannya perlu adanya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BNNP Papua Barat. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hasil capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran dan indeks capaian kegiatan selama satu tahun.

Dengan tersusunnya LKIP BNN Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat dalam memerangi Narkoba dan dapat mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) khususnya di Provinsi Papua Barat.

Manokwari, Januari 2025

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Papua Barat**



Jemmy G.P. Suatan, S.H., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Program Kerja	6
B. Rencana Kerja Tahunan	8
C. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Analisa Capaian Kinerja	12
B. Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 sebagai tindak lanjut Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan, dan Bidang Hukum dan Kerjasama. Melalui kelima Bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. BNNP Papua Barat sebagai unit kerja dari BNN yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berwajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti yang tertuang dalam lampiran ini.

BNNP Papua Barat dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun Anggaran 2024 memiliki sasaran strategis **“Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Secara Efektif di Provinsi Papua Barat”**,

Faktor geografis Provinsi Papua Barat yang begitu sulit dijangkau antar Kabupaten/Kota menjadi salah satu kendala yang berkelanjutan dari tahun ke tahun dalam pelaksanaan kegiatan P4GN. Transportasi darat yang dapat digunakan hanya ke Kabupaten Manokwari Selatan sedangkan daerah lain melewati darat memerlukan usaha lebih karena kondisi jalan dan keamanan. Kemudian untuk menjangkau daerah lain hanya dapat menggunakan pesawat dan kapal laut. Sehingga dalam menerapkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) memerlukan upaya yang lebih keras lagi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Permasalahan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia di BNNP Papua Barat, Secara keseluruhan jumlah pegawai di BNNP Papua Barat berjumlah 46 pegawai hal ini masih jauh dari jumlah pegawai ideal pada tingkat BNNP sesuai Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/888/XI/KA/KP.07.00/2022/BNN tentang Daftar Nama, Kelas, dan Formasi Jabatan Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dimana di setiap BNNP seharusnya memiliki 153 pegawai.

Beberapa langkah yang telah di tempuh BNNP Papua Barat dalam menghadapi kendala tersebut diatas adalah untuk permasalahan personil staf pelaksana maupun pejabat BNNP Papua Barat telah meminta kepada Biro Kepegawaian BNN, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Polda Papua Barat agar diberikan penambahan personil.

Dari segi sarana dan prasarana BNNP Papua Barat belum memiliki gedung kantor sendiri, sehingga masih harus menyewa ruko dengan biaya yang mahal. Untuk mengatasi hal ini BNNP Papua Barat untuk jangka panjang sedang melakukan pendekatan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memberi hibah berupa tanah untuk pembangunan Gedung kantor BNNP Papua Barat, kemudian untuk jangka pendek BNNP Papua Barat sedang berupaya melakukan pendekatan kepada instansi lain baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pinjaman gedung sementara yang akan digunakan sebagai kantor BNNP Papua Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang BNN di daerah maka dibentuk BNN Provinsi yang berkedudukan di ibukota Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dibentuk 34 BNN Provinsi dan salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat. Selanjutnya Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tersebut diubah terakhir dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pemerintah serta Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, BNNP Papua Barat selaku entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja yaitu unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja memiliki kewajiban laporan kinerja.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika

Nasional dalam wilayah Provinsi Papua Barat, yang berkedudukan di Manokwari, Papua Barat.

- b. BNNP Papua Barat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dan dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas

Tugas BNNP Papua Barat yaitu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Papua Barat.

3. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

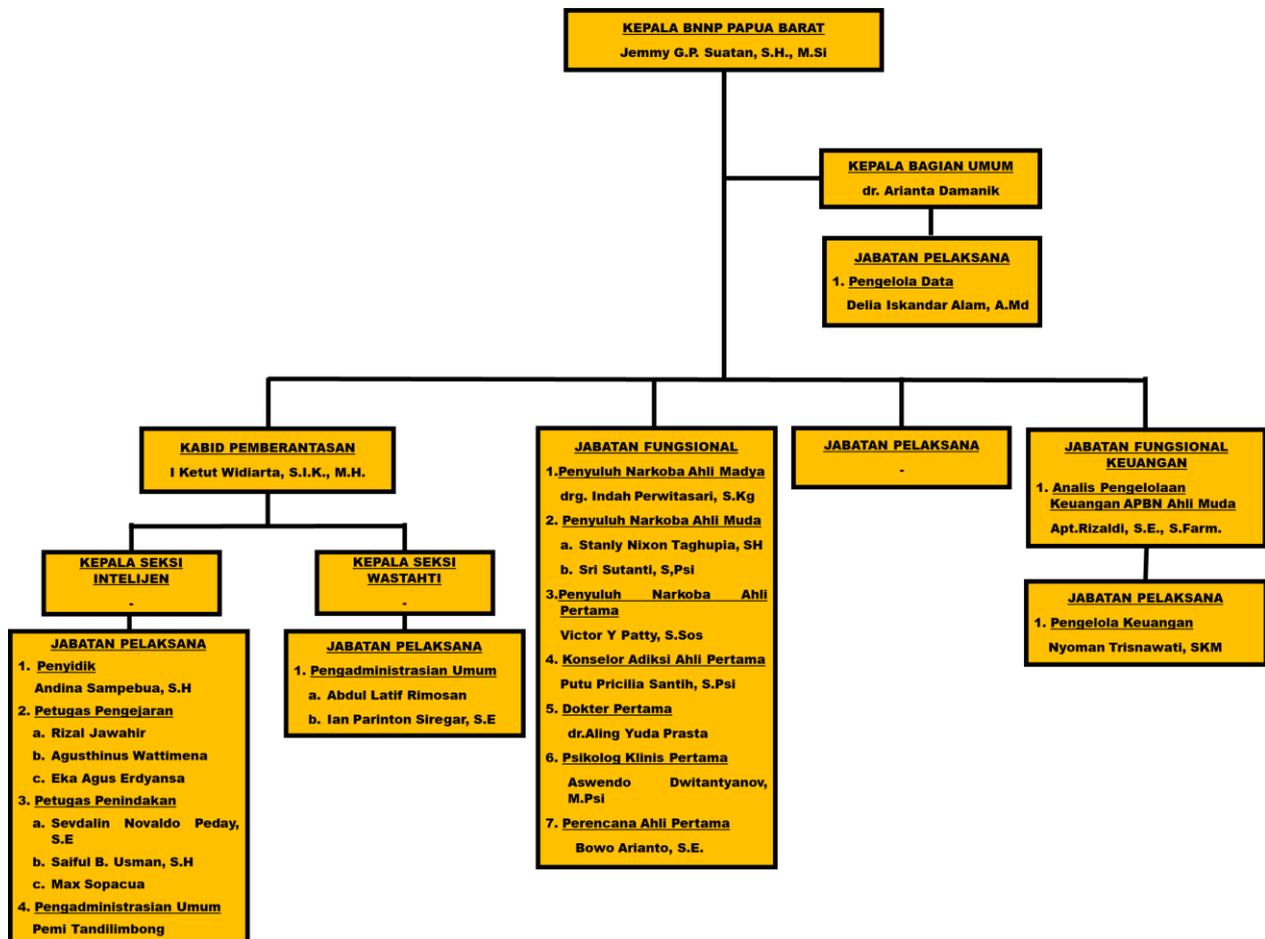
4. Kewenangan

Kewenangan BNNP secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNNP berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

D. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di BNNP Papua Barat sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat



E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNNP Papua Barat, antara lain Gambaran Umum, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi BNN.

BAB II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan tentang Rencana Strategis/Rencana Program Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas tentang penetapan kinerja tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan analisis pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat tahun 2024, Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, Permasalahan dan Rekomendasi.

BAB IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Program Kerja

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan Rencana Strategi 2020-2024 yang mengacu pada visi misi pembangunan sosial **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong**, serta mengacu pada Nawacita Presiden sejalan dengan visi BNN yaitu “terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba”. Dengan poin-poin misi, antara lain :

- a. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Professional;
- b. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba;
- c. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan, *core value* dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Disisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Kontruksi relasional dan substantif dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarah pada tujuan BNN tahun 2020-2024, yaitu **Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba** dan **Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas**. Berikut Rencana Program Kerja BNNP Papua Barat Tahun 2020-2024 :

Tabel 2.1 Rencana Program Kerja BNNP Papua Barat Tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	7	1	1	1	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	3	5	5	5	5
3	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	8	4	2	2	2
4	Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkotika Secara Berkelanjutan	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”	1	1	1	1	1
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diIntervensi	-	2.5	2.5	2.5	2.5
5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	-	5	10	10	10
		Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	-	10	25	25	25
6	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2	3	2	2	2
		Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	1	1	1	1	1
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	-	3,2	3,2	3,2	3,2
8	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	7	5	5	5	5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	100	100	100	100
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100	100	100	100
10	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	88	90	92	94	96
11	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	-	94	96	97	99

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2024 terdiri dari 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba (P4GN). Adapun rincian kegiatan dan anggarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Program Dukungan Manajemen

NO	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	a. Layanan Perkantoran	12 Layanan	Rp1.388.466.000
		b. Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen	Rp216.0000
2	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	a. Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	Rp21.950.000
3	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen	Rp4.431.000
4	Penyelenggaraan Tatusahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	a. Layanan BMN	1 Layanan	Rp10.880.000
		b. Layanan Umum	1 Layanan	Rp350.655.000
		c. Layanan Perkantoran	12 Layanan	Rp2.038.368.000
5	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	a. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	Rp17.513.000

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba (P4GN)

NO	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	Penyelenggaraan Advokasi	a. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga	Rp35.700.000
		b. Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa	2 Desa	Rp66.310.000
2	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	a. Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1 Laporan	Rp75.000.000
3	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	a. Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	35 Orang	Rp31.192.000
4	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	a. Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga	Rp237.904.000
5	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	a. Layanan Assesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	8 Orang	Rp31.400.000
		b. Layanan Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	2 Produk	Rp50.000.000
		c. Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotikadan TPPU	5 Orang	Rp30.524.000
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	a. Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	10 Orang	Rp13.255.000
7	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	a. Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	30 Orang	Rp33.913.000
		b. Layanan SKHPN	5000 Orang	Rp1.160.000.000
		c. Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	2 Lembaga	Rp45.085.000
		d. Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2 Lembaga	Rp44.450.000
8	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	a. Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	6 Perkara	Rp472.698.000
9	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	a. SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Softskill	2 Lembaga	Rp170.300.000

C. Perjanjian Kinerja

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua Barat telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang
5	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasional di Wilayah Provinsi	1 Lembaga
		Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	2 Unit
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	3,60 Indeks
7	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	68%
8	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	5 Berkas Perkara

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
9	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100 Indeks
10	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	87 Indeks
11	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	97.66 Indeks
12	Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	76 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 di lingkup BNN Provinsi Papua Barat telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian realisasi perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran pencapaian perjanjian kinerja BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang
5	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasional di Wilayah Provinsi	1 Lembaga

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Jumlah Unit Penyelenggaran Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2 Unit
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,60 Indeks
7	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	68%
8	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	5 Berkas Perkara
9	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100 Indeks
10	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	87 Indeks
11	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	97.66 Indeks
12	Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	76 Indeks

Berdasarkan perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 maka realisasi pencapaian kinerja selama tahun 2024 untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

1.	Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi
-----------	---

Sasaran Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelatihan Sofskill kepada SMP/SMU untuk memperoleh Pengembangan Soft Skill di 10 sekolah SMA/SMK/Sederajat di Kabupaten Manokwari melalui media konvensional yaitu melalui Dialog Interaktif dan Penyelenggaraan Informasi Edukasi pada berbagai media seperti Media Cetak, Talkshow, Branding, Radio, Televisi Daerah, Media Luar Ruangan dan *Podcast*.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahguna Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi adalah 1 (satu) Kabupaten/Kota dan capaian 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Data capaian kinerja indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba kategori “tinggi” di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	100%

Definisi operasional dari indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba. Pengukuran menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk

mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capain sasaran Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilakukan secara nasional yang perhitungannya dilakukan terpusat melalui Aplikasi mobile "Dektari Aja" terhadap 258 remaja yang telah menerima Materi ketahanan diri remaja anti narkoba. Berdasarkan Surat Deputi Pencegahan Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 24 Desember 2024 perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Dektari) Tahun 2024, BNNP Papua Barat memperoleh Indeks sebesar 54,58 untuk Tahun 2024 dengan kategori “sangat tinggi”, dimana BNNP Papua Barat mengalami peningkatan indeks dari Tahun 2023 yang memperoleh indeks sebesar 45,00. Berikut perbandingan sasaran Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya :

Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kab/ Kota	1 Kab/ Kota	1 Kab/ Kota	1 Kab/ Kota	0 Kab/ Kota	1 Kab/ Kota

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang tidak dapat mencapai target. Sedangkan capaian tahun 2024 sesuai dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 1 Kabupaten/Kota, Berikut perbandingannya :

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi Tahun 2024 dengan Renproja BNNP Papua Barat.

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2024
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional : Perbandingan realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) kinerja tahun 2024 BNNP Papua Barat dengan realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) secara nasional yaitu dektari rata-rata Nasional sebesar 52,04 sedangkan nilai dektari Provinsi Papua Barat sebesar 54,58 berkategori “sangat tinggi” dengan persentase persentase capaian 104,88%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Tingkat efisiensi kinerja indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	100	98,20	1,8

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,8%.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor kegagalan tercapainya target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahguna Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi dikarenakan kegiatan informasi dan edukasi mengalami beberapa kendala seperti :

- 1) Pengisian kuesioner dektari diberikan kepada siswa yang telah menerima materi ketahanan diri remaja anti narkoba;
- 2) Melaksanakan alur kegiatan pengembangan softskill sesuai dengan pentunjuk teknis;
- 3) Selektif dalam pengisian aplikasi dektari pada kuesioner evaluasi dependen yang diberikan kepada remaja. Selektif dalam memilih profil sekolah penerima pelatihan pengembangan softskil.

d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan capaian Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi, maka upaya dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengikuti Target Sasaran Kegiatan Softskil Tahun 2025 sesuai dengan kebijakan BNN RI;

- 2) Melaksanakan Informasi dan Edukasi sebagai hasil penguat kuesioner dektari;
- 3) Selektif dalam memilih profil sekolah penerima pelatihan pengembangan softskil 2025.

2.	Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi
-----------	--

Sasaran Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di Kampung Aimasi Kabupaten Manokwari, Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu rapat koordinasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba untuk menentukan sasaran keluarga yang akan diintervensi serta mengadvokasi stakeholder yang bersangkutan untuk ikut bekerjasama dalam program intervensi ketahanan keluarga anti narkoba dan intervensi pelaksanaan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi adalah 1 (satu) Kabupaten/Kota dan capaian 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Data capaian kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	100%

Definisi operasional dari indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu BNNP Papua Barat memilih desa (Desa Bersinar) yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (Kampung Aimesi). Pengukuran DEKTARA dilakukan pada 10 Keluarga di Kampung Aimesi yang menerima Intervensi ketahanan Keluarga Anti Narkoba kemudian diolah menggunakan Aplikasi Dektara.

Berdasarkan Surat Deputi Pencegahan Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN tanggal 23 Desember 2024 perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2024 dimana BNNP Papua Barat memperoleh Indeks sebesar 85,625 pada Tahun 2024 dengan kategori “tinggi”, hasil tersebut mengalami peningkatan dari Tahun 2023 yang mendapatkan indeks 76,696. Adapun klasifikasi penghitungan Dektara yaitu :

- 1) Nilai 88,31 – 100 masuk dalam Kategori Sangat Tinggi.
- 2) Nilai 76,61 – 88,30 masuk dalam Kategori Tinggi.
- 3) Nilai 65,00 – 76,60 masuk dalam Kategori Rendah.
- 4) Nilai 25,00 – 64,99 masuk dalam Kategori Sangat Rendah

Berikut perbandingan sasaran Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya :

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kab/Kota					

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi selaras dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 5 keluarga dalam 1 Kabupaten/Kota dengan kategori tinggi. Berikut perbandingannya :

Tabel 3.8 Perbandingan realisasi kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi Tahun 2024 dengan Renproja BNNP Papua Barat.

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2024
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota atau 5 Keluarga	1 Kabupaten/Kota atau 5 Keluarga

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional : Perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) BNNP Papua Barat Tahun 2024 dengan Nasional yaitu nilai

dektara rata-rata Nasional sebesar 86,787 sedangkan nilai dektara BNNP Papua Barat sebesar 85,625 dengan persentase capaian 98,66%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Tingkat efisiensi kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	100	100	0

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi mencapai 100% adalah dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BNNP Papua Barat telah dilaksanakan dengan baik dan optimal dalam pendampingan serta bimbingan dalam pelaksanaan ketahanan keluarga anti narkoba seperti :

- 1) Pelaksanaan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti narkoba berpedoman sesuai dengan juknis dan modul dari pembina fungsi Deputi Pencegahan;
- 2) Adanya pelatihan fasilitator anak, fasilitator orang tua dan fasilitator keluarga yang diberikan kepada penyuluh narkoba di BNNP.

d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

Dalam usaha mempertahankan keberhasilan pencapaian target Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan

Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi, maka upaya dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Mempelajari Juknis dan Modul terbaru yang akan dikeluarkan oleh pembina fungsi untuk melaksanakan kegiatan tahun 2025;
- 2) Melaksanakan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba sesuai dengan modul terbaru;
- 3) Aktif dalam menjalin komunikasi dengan stakeholder;
- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan timeline.

3.	Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi
-----------	--

Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN dilaksanakan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi adalah 1 (satu) Kabupaten/Kota dan capaian 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.10 Data capaian kinerja indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	100%

Definisi operasional dari Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja

(pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, ormas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba. Adapun instrument untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variable sebagai berikut :

- 1) SDM : adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- 2) Metode : adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- 3) Anggaran : adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- 4) Material : adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- 5) Sistem (Kebijakan) : adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- 6) Aktivitas : adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capain sasaran Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN dengan pengisian Kuissoner Indeks Kemandirian Partisipasi oleh penggiat anti narkoba dari Instansi dalam kegiatan pemberdayaan anti narkoba yang telah dilaksanakan BNNP Papua Barat. Kriteria IKP dalam Lembaga mempunyai Karakteristik yang berbeda, penilaian IKP didasarkan tabel berikut :

Tabel 3.11 Klasifikasi Penilaian IKP

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
2,51 – 3, 25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

Berdasarkan surat Deputi Pemberdayaan Masyarakat Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN tanggal 11 Desember 2024 perihal Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024, BNNP Papua Barat memperoleh Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2024 sebesar 3,47 dengan kriteria “sangat mandiri”. Capaian tahun 2024 tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,14 dari capaian tahun 2023 dengan indeks 3,33 dalam 1 kabupaten/kota dengan kriteria “sangat mandiri”. Berikut perbandingan sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya :

Tabel 3.12 Perbandingan realisasi kinerja indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	1 Kab/ Kota	1 Kab/ Kota	1 Kab/ Kota	1 Kab/ Kota	1 Kab/ Kota	1 Kab/ Kota

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi tidak selaras dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 2 Kabupaten/Kota dengan kategori tinggi. Berikut perbandingannya :

Tabel 3.13 Perbandingan realisasi kinerja indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” di wilayah provinsi Tahun 2024 dengan Renproja BNNP Papua Barat.

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2024
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	2 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional : Perbandingan Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 antara Nilai Indeks Nasional sebesar 3,59 dengan Nilai Indeks Provinsi Papua Barat sebesar 3,47 dengan persentase capaian 96,65%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 Tingkat efisiensi kinerja indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	100	99,39	0,61

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,61%.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi karena dalam pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Selain faktor tersebut terjalinnya hubungan BNNP Papua Barat dengan

stakeholder yang terjaga dalam pelaksanaan kegiatan dan kerjasama tim serta upaya untuk terus menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya P4GN secara mandiri dan berkelanjutan.

d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan dan mempertahankan pencapaian target, maka upaya dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong instansi/lembaga melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui test urine secara mandiri untuk menciptakan lingkungan bersih narkoba.
- 2) Mendorong instansi/lembaga membuat penggiat anti narkoba di lingkungannya masing-masing
- 3) Meningkatkan peran instansil/lembaga dan penggiat yang telah dibentuk untuk berpartisipasi aktif mendukung program P4GN.
- 4) Meningkatkan pembinaan berkelanjutan bagi para penggiat yang telah dibentuk dengan cara menjaga agar kelangsungan program mandiri yang telah dilaksanakan oleh para penggiat P4GN dapat dipertahankan dan ditingkatkan pelaksanaannya secara berkelanjutan

4.	Indikator Kinerja : Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih
-----------	---

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi Adapun petugas berasal dari Kelurahan Manokwari Barat dan Kampung Aimasi. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dengan metode ceramah, praktik, serta penugasan.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 target Indikator Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih adalah 10 (sepuluh) orang dan capaian 10 (sepuluh) orang dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 3.15 Data capaian kinerja jumlah petugas penyelenggara layanan ibm yang terlatih.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

Definisi Operasional Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah masyarakat yang ditunjuk langsung oleh pihak kelurahan/kampung untuk menjadi Agen Pemulihan di wilayahnya masing-masing. Agen Pemulihan yang terpilih telah disahkan dalam SK Lurah/ Kepala Kampung serta mendapatkan bimbingan teknis/ pelatihan mengenai Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan operasional kegiatan hingga pelaporannya.

b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan yaitu dengan pre test dan post test pada saat bimbingan teknis untuk mengetahui pemahaman petugas penyelenggara pelayanan IBM (Agen Pemulihan) terkait dengan materi bimbingan teknis IBM sehingga Agen Pemulihan dapat menjalankan layanan IBM, kemudian didapatkanlah Agen Pemulihan yang terlatih sebanyak 10 orang pada Tahun 2024, hasil tersebut hampir sama dengan capaian Tahun 2023 sebanyak 10 orang Agen Pemulihan yang terlatih. Berikut perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya :

Tabel 3.16 Perbandingan realisasi kinerja petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{10}{10} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih BNNP Papua Barat Tahun 2024 selaras dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 10 orang. Berikut perbandinganya :

Tabel 3.17 Perbandingan realisasi kinerja petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih Tahun 2024 dengan Renproja BNNP Papua Barat.

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2024
1	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang	10 Orang

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Tingkat efisiensi kinerja petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	100	88,68	11,32

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,32%.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam kegiatan Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih yaitu:

- 1) Adanya koordinasi yang baik antara petugas BNNP Papua Barat dan Kelurahan/ Kampung terkait penunjukkan Agen Pemulihan (AP);
- 2) Adanya penyesuaian Agen Pemulihan serta tingkat keaktifan petugas IBM & AP dapat berpengaruh dalam operasional kegiatan IBM;
- 3) Adanya juknis dalam pelaksanaan kegiatan membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Selain itu juga ada faktor yang memiliki potensi menghambat proses kegiatan yaitu :

- 1) Jarak antara kantor BNNP Papua Barat dengan IBM Kampung Aimasi yang cukup jauh;
- 2) Penyesuaian waktu Agen Pemulihan untuk dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis.

d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan dan mempertahankan pencapaian target, maka upaya dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi intens bersama dengan AP, baik secara tatap muka maupun melalui telepon;
- 2) Petugas mengupayakan penunjukkan calon petugas IBM dengan mempertimbangkan peran sosial individu di masyarakat;
- 3) Meningkatkan sinergitas antara BNNP Papua Barat dan pihak kelurahan/kampung yang lebih memahami kondisi masyarakatnya.

5.

Indikator Kinerja : Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi

Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 target Indikator Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di

Wilayah Provinsi adalah 1 (satu) lembaga dan capaian 1 (satu) lembaga dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.19 Data capaian kinerja lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

Definisi Operasional Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi adalah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) merupakan lembaga baik LRIP maupun LRKM yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap bagi penyalahguna narkotika dengan standar pelayanan memenuhi Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor: 655/KEP/BSN/12/2022 tentang Penetapan SNI 8807:2022 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA

b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran pada kegiatan ini yaitu lembaga baik LRIP maupun LRKM yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap bagi penyalahguna narkotika berdasarkan surat Deputi Rehabilitasi Nomor : B/125/I/DE/RH.02.03/2025/BNN perihal Hasil Evaluasi Pemenuhan SNI Target Wilayah (Reguler) Th. 2024 menerangkan bahwa RSAL dr. Azhar Zahir Manokwari Papua Barat telah memenuhi SNI tahun 2024 dengan standar pelayanan memenuhi Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor: 655/KEP/BSN/12/2022 tentang Penetapan SNI 8807:2022 tentang penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Orang dengan Gangguan Penggunaan Napza.

Sehingga pada tahun 2024 BNNP Papua Barat telah mencapai target 1 Lembaga yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), hasil tersebut

sama dengan capaian Tahun 2023 sebanyak 1 lembaga. Berikut perbandingan capaian Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya :

Tabel 3.20 Perbandingan realisasi kinerja lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1 Lembaga					

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi Tahun 2024 sebanyak 1 Lembaga sesuai dengan target dari Perjanjian Kinerja, tetapi target tahun 2024 tidak sesuai dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 2 Lembaga karena adanya penyesuaian target dan anggaran. Berikut perbandingannya :

Tabel 3.21 Perbandingan realisasi kinerja lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah provinsi Tahun 2024 dengan Renproja BNNP Papua Barat.

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2024
1	Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	2 Lembaga	1 Lembaga

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22 Tingkat efisiensi kinerja lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	100	99,94	0,06

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,06%.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian target Indikator Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi yaitu:

- 1) Pendampingan yang berkelanjutan oleh petugas BNNP Papua Barat kepada lembaga rehabilitasi dalam pemenuhan standar pelayanan SNI 8807:2022;
- 2) Adanya komitmen dan upaya nyata dari pemangku kepentingan di lembaga rehabilitasi dalam melengkapi persyaratan SNI 8807:2022 di lembaga tersebut dalam rangka peningkatan mutu layanan;
- 3) Tersedianya sumber daya baik SDM maupun fasilitas yang dapat mendukung tercapainya SNI 8807:2022 pada lembaga rehabilitasi dimaksud.

d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), BNNP Papua Barat akan terus melakukan pendampingan kepada lembaga rehabilitasi akan dilaksanakan secara terencana dengan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap rencana aksi yang disusun oleh lembaga rehabilitasi itu sendiri. Petugas pendamping BNNP Papua Barat akan lebih proaktif dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagi lembaga sehingga dapat mendorong lembaga rehabilitasi untuk memenuhi standar layanan SNI 8807:2022.

6.	Indikator Kinerja : Jumlah Unit Penyelenggaran Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional
-----------	--

Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembentukan Unit IBM, Asistensi dan Evaluasi Unit IBM

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 target Indikator Jumlah Unit Penyelenggaran Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi adalah 2 (satu) unit dan capaian 2 (satu) unit dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.23 Data capaian kinerja jumlah unit penyelenggaran layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat (IBM) di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Unit Penyelenggaran Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	2 Unit	2 Unit	100%

Definisi operasional dari Jumlah Unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan Intervensi di bidang rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capain unit IBM yang operasional adalah IBM yang operasional berada di Kelurahan Manokwari Barat dan Kampung Aimasi dengan 10 Agen Pemulihan sebagai pelaksana teknis IBM. Berdasarkan Surat Deputi Rehabilitasi Nomor : B/1/I/DR/RH.02.03/2024/BNN tanggal 30 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Operasionalisasi Unit IBM T.A 2024, IBM Kelurahan Manokwari Barat dan Kampung Aimasi yang dibina oleh BNNP Papua Barat berada pada Fase Tangguh. Sehingga pada tahun 2024 BNNP Papua Barat telah mencapai target Jumlah Unit Penyelenggaran Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi sebanyak 2 unit, capaian tersebut sama dengan capaian Tahun 2023 sebanyak 2 unit yang terletak di Kelurahan Wosi dan Kelurahan Arowi Kabupaten Manokwari. Berikut perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya :

Tabel 3.24 Perbandingan realisasi kinerja jumlah unit penyelenggaran layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat (IBM) di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Jumlah Unit Penyelenggaran Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{2} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi Tahun 2024 sebanyak 2 Unit atau lebih banyak 1 Unit dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 1 Unit IBM. Berikut perbandingannya :

Tabel 3.25 Perbandingan realisasi kinerja jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Tahun 2024 dengan Renproja BNNP Papua Barat.

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2024
1	Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	1 Unit	2 Unit

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26 Tingkat efisiensi kinerja jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat (IBM) di wilayah provinsi.

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	100	100	0

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian target unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah:

- 1) Keaktifan dan sinergitas antara Petugas Pendamping IBM BNNP Papua Barat dan Agen Pemulihan dalam operasional layanan IBM mencakup sosialisasi, pemetaan, penjangkauan, pendampingan, layanan wajib, layanan pilihan, dan bina lanjut;
- 2) Adanya dukungan masyarakat maupun pihak kelurahan dan kampung terhadap kegiatan-kegiatan IBM, sehingga Agen Pemulihan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pendampingan pemulihan bagi penyalahguna narkotika.

Selain itu juga ada faktor yang memiliki potensi menghambat proses kegiatan yaitu :

- 1) Jarak antara kantor BNNP Papua Barat dengan IBM Kampung Aimasi yang cukup jauh;
- 2) Penyesuaian waktu antar Agen Pemulihan untuk dapat melakukan kegiatan IBM mengingat setiap AP memiliki latar belakang pekerjaan yang berbedabeda.

d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM, BNNP Papua Barat mengintensifkan sosialisasi bahaya Narkoba dan mensosialisaikan program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba, serta meningkatkan peran stakeholder untuk ikut berpartisipasi mendukung program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba. Selain itu kedepan akan melakukan sinergi dengan bidang P2M dan Bidang Pemberantasan dalam menentukan Desa Bersinar/lokasi IBM. Melalui sinergitas juga diharapkan upaya pemulihan yang diberikan dapat lebih komprehensif..

7.	Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat
-----------	---

Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 target Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat adalah 3,60 (tiga koma enam puluh) dengan capaian tahun 2024 sebesar 3,64 (tiga koma enam puluh empat) dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.27 Data capaian indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	3,60 Indeks	3,64 Indeks	101%

Definisi operasional dari Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah pengukuran dengan subjek klien yang telah mengikuti layanan rehabilitasi di BNNP Papua Barat minimal 3 kali pertemuan sebagai bentuk implementasi kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan secara berkala sebagaimana amanah Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Tujuan pelaksanaan pengukuran Memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penerima layanan rehabilitasi di lingkungan BNN yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan zat (*substance use disorder*).

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capain Indeks kepuasan layanan Masyarakat dengan menggunakan kuesioner yang diberikan pada klien dan diinput nilainya melalui Format yang telah disediakan oleh Direktorat Pascarehabilitasi BNN RI melalui <https://ikm-rehabilitasi.bnn.go.id> menggunakan skala likert mencakup 9 aspek penilaian, yaitu Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana.

Sehingga didapatkan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 adalah 3,64 atau dalam kategori Sangat Baik sesuai dengan Surat Plt. Deputi Rehabilitasi Nomor : B/47/1/DE/RH.02/2025/BNN tanggal 7 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran IKR, IKM, dan Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, capaian tersebut mengalami penurunan dari Tahun 2023 yang memperoleh nilai sebesar 3,82. Berikut perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya :

Tabel 3.28 Perbandingan realisasi kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi.

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	3,2 Indeks	3,30 Indeks	3,60 Indeks	3,66 Indeks	3,82 Indeks	3,64 Indeks

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3,64}{3,60} \times 100 = 101\%$$

Dari data diatas capain Indikator Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2024 sebesar 3,64 melebihi target Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat sebesar 3,2. Berikut perbandingannya :

Tabel 3.29 Perbandingan realisasi kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Tahun 2024 dengan Renproja BNNP Papua Barat.

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2024
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	3,2 Indeks	3,82 Indeks

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30 Tingkat efisiensi kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi.

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	101	100	1

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1%.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian target capaian Indeks kepuasan Masyarakat adalah

- 1) Koordinasi dan sinergitas yang baik antara BNNP Papua Barat dengan klien serta penyelenggara layanan rehabilitasi sehingga klien dapat melengkapi data survey;
- 2) Pemahaman klien terhadap butir-butir skala sehingga sebelum dilaksanakan pengukuran, peran petugas pemberi informasi/ administrasi tes dalam memastikan pemahaman klien sangatlah penting untuk mendapatkan keakuratan data;
- 3) Jaringan internet yang memadai, karena pengukuran skala menggunakan instrumen online.

d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan dan mempertahankan pencapaian target, maka upaya dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelum dilakukan pengukuran, petugas bidang rehabilitasi perlu memastikan pemahaman klien terkait setiap butir skala agar memperoleh data yang akurat;
- 2) Petugas melakukan pendataan terhadap klien yang telah menjalani layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Kasuari BNNP Papua Barat;
- 3) Petugas memastikan jaringan internet telah memadai sebelum dilakukan pengisian instrumen.

8.

Indikator Kinerja : Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

Sasaran Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 target Indikator Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dengan capaian sebesar 100% (seratus persen) dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.31 Data capaian Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	68%	100%	147%

Definisi operasional Persentase penyalahguna yang mengalami peningkatan hidup adalah persentase dari jumlah klien yang menjalani layanan pascarehabilitasi di BNNP Papua Barat dan mengalami peningkatan kualitas hidup dengan *evidence* berupa peningkatan skor perolehan skala WHOQoL-BREF pada saat pengukuran awal yaitu sebelum mengikuti layanan pascarehabilitasi dan pada saat pengukuran akhir yaitu setelah klien selesai mengikuti layanan pascarehabilitasi. Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen WHOQoL-BREF dan Roda Kehidupan dengan data bersifat kualitatif.

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

adalah dengan menggunakan instrumen WHOQoL-BREF yang disusun oleh WHO. WHOQoL terdiri dari 4 domain yang mengukur fisik, psikologis, sosial dan lingkungan pecandu/penyalahguna. Instrumen ini terdiri dari skala 1 sampai 5.

Nilai akhir diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai/skor akhir pada setiap domain kemudian ditransformasikan ke nilai 0-100 (sesuai norma). Berdasarkan surat dari Surat Plt. Deputi Rehabilitasi Nomor : B/47/1/DE/RH.02/2025/BNN tanggal 7 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran IKR, IKM, dan Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024 dimana BNNP Papua barat memperoleh hasil Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup sebesar 100%.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{68} \times 100 = 147\%$$

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32 Tingkat efisiensi kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi.

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	147	100	47

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 47%.

e. Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian target capain Indeks kepuasan Masyarakat adalah

- 1) Perencanaan kegiatan layanan pascarehabilitasi yang sesuai kebutuhan dan regulasi yang berlaku, sehingga proses pemulihan berkelanjutan dapat berjalan efektif dan efisien.

- 2) Adanya pemahaman petugas yang baik terhadap instrumen WHOQoL-BREF dan Roda Kehidupan, sehingga interpretasi data hasil pengukuran dapat lebih komprehensif.

f. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan capaian Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup, BNNP Papua Barat melakukan dengan meningkatkan kapasitas petugas rehabilitasi terkait pelaksanaan layanan rehabilitasi berkelanjutan, sehingga upaya pemulihan lebih signifikan berpengaruh terhadap klien

9.	Indikator Kinerja : Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21
-----------	--

Sasaran Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya

c. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 target Indikator Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21 adalah 5 (lima) berkas dan realisasi capaian tahun 2024 sebanyak 9 (sembilan) berkas dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.33 Data capaian jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	5 Berkas	9 Berkas	180%

Definisi operasional Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tindak pidana Narkotika yang telah lengkap dan telah diterima oleh Kejaksaan untuk diperiksa

kelengkapannya, apabila sudah memenuhi syarat maka akan dilimpahkan ke Pengadilan.

d. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika P21 adalah melalui kegiatan penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika yang telah dilaksanakan BNNP Papua Barat selama Tahun 2024 yang telah dikirim ke Kejaksaan dan telah diperiksa kelengkapannya. Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika P21 dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.34 Data Berkas Perkara Tersangka P-21

NO	TERSANGKA	STATUS	TANGGAL LKN	TANGGAL P-21
1	Jusrif alias Yusri	P-21	21 November 2023	19 Maret 2024
2	Arfan alias Appa	P-21	21 November 2023	19 Maret 2024
3	Agus	P-21	21 November 2023	19 Maret 2024
4	Faisal Mattalata Alias Ichal	P-21	5 Januari 2024	30 April 2024
5	Rudolf Augusto Alias Agus	P-21	5 Januari 2024	30 April 2024
6	Rudolf Augusto Alias Agus	P-21	08 Januari 2024	14 Mei 2024
7	Ronald Izaak Waney Alias Ronal	P-21	01 Maret 2024	27 Juni 2024
8	David Abednego	P-21	04 Mei 2024	04 Juli 2024
9	Alfaro Kurinus Yapen	P-21	07 Juli 2024	25 Juli 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21 BNNP Papua Barat Tahun 2024 sebanyak 9 Berkas Perkasara.

Capaian tersebut meningkat dari capaian Tahun 2023 yang berjumlah 4 Berkas Perkara. Berikut perbandingan capaian jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yang P-21 Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya :

Tabel 3.35 Perbandingan realisasi kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yang P-21.

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	7 Berkas Perkara	5 Berkas Perkara	5 Berkas Perkara	8 Berkas Perkara	4 Berkas Perkara	9 Berkas Perkara

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{9}{5} \times 100 = 180\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21 BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2024 sejumlah 9 berkas perkara, capaian tersebut tidak sesuai target Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat sejumlah 5 berkas perkara. Berikut perbandingannya :

Tabel 3.36 Perbandingan realisasi kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yang P-21 Tahun 2024 dengan Renproja BNNP Papua Barat.

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2024
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	5 Berkas Perkara	9 Berkas Perkara

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.37 Tingkat efisiensi kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yang P-21.

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	180	99.98	0.02%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 80.2%.

e. Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian target Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika P21 sebesar 180% adalah :

- 1) Terdapat 3 Berkas yang yang P-21 DI Tahun 2024 dari berkas LKN tahun 2023 sebagai berikut :

NO	TERSANGKA	STATUS	TANGGAL LKN	TANGGAL P-21
1	Jusrif alias Yusri	P-21	21 November 2023	19 Maret 2024
2	Arfan alias Appa	P-21	21 November 2023	19 Maret 2024
3	Agus	P-21	21 November 2023	19 Maret 2024

- 2) Kurangnya jumlah SDM dalam menangani proses penyidikan;
- 3) Terjalannya hubungan baik dengan stakeholder sehingga membantu dalam penanganan kasus Narkoba;
- 4) Pelaksanaan kegiatan penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika yang efektif, efisien dan tepat sasaran;
- 5) Komitmen yang tinggi pimpinan dan tim pembarnatasan BNNP Papua Barat dalam mengungkap peredaran gelap narkoba.

f. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

Dalam usaha untuk memerangi peredaran gelap Narkotika, maka upaya dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan penambahan SDM untuk mempercepat proses penyidikan agar segera P-21;
- 2) Memetakan kembali jaringan sindikat peredaran gelap narkoba yang beroperasi di Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya;
- 3) Meningkatkan sarana dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan intelijen berbasis teknologi;
- 4) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Stakeholder dalam pengungkapan kasus Narkoba dan penyelesaian berkas perkara agar segera P-21;
- 5) Meningkatkan kemampuan personil intelijen untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba.

10.	Indikator Kinerja : Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan
------------	---

Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkoba dan non Narkoba.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 target Indikator Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan adalah 100 (seratus) dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100 (seratus) dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.38 Data capaian nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100%

Definisi operasional dari nilai tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi : tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

b. Metode Pengukuran

Definisi dari Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan adalah pelayanan perawatan dan pengawasan tahanan tindak pidana narkotika dan tahanan TPPU hasil tindak pidana narkotika. Adapun metode pengukurannya adalah dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Dimana tahun 2024 tahanan masuk dan keluar dengan jumlah yang sama yaitu 5 tersangka. Capaian Indikator Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan BNNP Papua Barat Tahun 2024 sama dengan capaian Tahun 2023 yaitu dengan Indeks 100. Berikut perbandingan capaian Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya :

Tabel 3.39 Perbandingan realisasi kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan.

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan BNNP Papua Barat Tahun 2024 sama dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat yaitu dengan indeks 100. Berikut perbandingannya :

Tabel 3.40 Perbandingan realisasi kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan Tahun 2024 dengan Renproja BNNP Papua Barat.

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2024
1	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	100

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.41 Tingkat efisiensi kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan.

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	100	0

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian target Nilai Tingkat Keamanan dan Ketertiban Kesehatan Tahanan yaitu terjaganya sinergitas dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pengawasan Tahanan. Kendala yang dihadapi belum adanya Ruang Tahanan yang lebih memadai.

d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

Dalam usaha untuk memerangi peredaran gelap Narkotika, maka rencana aksi dan strategi kedepan yaitu nenpererat sinergitas dan koordinasi dengan

stakeholder terkait dalam penanganan tahanan, dikarenakan BNNP Papua Barat sampai saat ini belum memiliki Kantor dan Ruang Tahanan yang memadai.

11.	Indikator Kinerja : Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika
------------	--

Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 target Indikator Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika adalah 100 (seratus) dan capaian 100 (seratus) dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.42 Data capaian nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100%

Definisi operasional dari nilai tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika yang dapat mengganggu proses penyidikan seperti hilangnya barang bukti atau rusaknya barang bukti.

b. Metode Pengukuran

Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika adapun metode pengukurannya adalah dengan tingkat pengawasan dan pemeliharaan dan pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika tidak ada masalah

seperti barang bukti hilang, kecuali adanya penyusutan untuk keperluan penyidikan.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan mendata, mengamankan, dan mengawasi barang bukti Narkotika dan Non Narkotika serta melakukan pemusnahan barang bukti apabila berkas sudah P21 dengan disaksikan stakeholder yang bersangkutan. Berikut data Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika tahun 2024 :

Tabel 3.43 Daftar jumlah barang bukti.

NO	BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Ganja	699,5 gram
2	Sabu	20,6 gram
3	Tas Ransel	2 Buah
4	Handphone	4 Buah
7	Simcard	4 Buah

Capaian Indikator Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika BNNP Papua Barat Tahun 2024 sama dengan capaian Tahun 2023 yaitu dengan Indeks 100. Berikut perbandingan capaian kinerja Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

Tabel 3.44 Perbandingan realisasi kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika.

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika BNNP Papua Barat Tahun 2024 sama dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat yaitu dengan indeks 100. Berikut perbandingannya :

Tabel 3.45 Perbandingan realisasi kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika Tahun 2024 dengan Renproja BNNP Papua Barat.

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2024
1	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.46 Tingkat efisiensi kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika.

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100	0

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan

Dengan keterbatasan sarana dan prasarana BNNP Papua Barat Berupaya untuk bekerja secara professional. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu belum adanya penyimpanan barang bukti Narkotika yang terkhusus untuk Seksi Wastahti dan untuk sementara narkotika di simpan di dalam brangkas penyimpanan senjata api organik BNNP Papua Barat.

d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

BNNP Papua Barat akan mempertahankan kinerja dalam memerangi Narkoba dan Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkotika dan peningkatan SDM personil

12.	Indikator Kinerja : Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat
------------	--

Sasaran Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 target Indikator Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat adalah 87 (delapan puluh tujuh) dan capaian 96,43 (sembilan puluh enam koma empat puluh tiga) dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.47 Data capaian nilai kinerja anggaran.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	87 Indeks	96,43 Indeks	110,84%

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran BNNP Papua Barat adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNNP yang terdiri atas perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran nilai kinerja anggaran BNNP Papua Barat diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan

sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan. yang tersedia pada aplikasi <https://smart.kemenkeu.go.id>. Berikut hasil dari perhitungan Nilai Kinerja Anggaran :

Gambar 3.1 Hasil indeks nilai kinerja anggaran

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	682763	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	96,66	96,19	96,43

Dari data diatas BNNP Papua Barat Tahun 2024 memperoleh Indeks sebesar 96,43 hasil tersebut mengalami peningkatan dari capaian Tahun 2023 sebesar 86,22. Berikut perbandingan Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya :

Tabel 3.48 Perbandingan realisasi kinerja nilai kinerja anggaran.

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2021	2022	2023
1	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	88 Indeks	80 Indeks	87 Indeks	69,46 Indeks	86,22 Indeks	96,43 Indeks

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{96,43}{87} \times 100 = 110,84\%$$

Dari data diatas capain Indikator Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat Tahun 2024 diatas target Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat yaitu dengan indeks 96. Berikut perbandinganya :

Tabel 3.49 Perbandingan realisasi kinerja nilai kinerja anggaran Tahun 2024 dengan Renproja BNNP Papua Barat.

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2024
1	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	96	96,43

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.50 Tingkat efisiensi kinerja nilai kinerja anggaran.

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	110,84	99,86	10,98

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,98%.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor target nilai kinerja anggaran BNNP Papua Barat melebihi target Tahun 2024 sebesar 110,84% atau dengan Indeks 96,43 karena terdapat kebijakan baru dari Kemenkeu tentang rumus perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024, selain itu kendala blokir perjalanan dinas yang mempengaruhi dalam realisasi anggaran serta capaian output dalam pelaksanaan anggaran 2024.

d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Nilai kinerja anggaran BNNP Papua Barat, maka upaya dan strategi ke depan adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pada BNNP Papua Barat dengan terus meningkatkan sinergitas dengan semua bidang dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

13.

Indikator Kinerja : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat

Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 target Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat adalah 97,66 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh enam) dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 96,19 (sembilan puluh enam koma sembilan belas) dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.51 Data capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	97,66 Indeks	96,19 Indeks	98,45%

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada *Online Monitoring SPAN* yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BNNP Papua Barat adalah dilihat dari kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang tersedia pada aplikasi OMSPAN dengan rincian capaian sebagai berikut :

Gambar 3.2 Hasil indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	065	066	682761	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100,00	83,80	98,49	100,00	100,00	97,01	96,89	96,19	100%	0,00	96,19
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	12,57	19,70	10,00	10,00	9,70	24,22				
					Nilai Aspek		91,90			98,88		96,89				

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat Tahun 2024 sebesar 96,19, Capaian tersebut mengalami penurunan dari capaian Tahun 2023 dengan indeks sebesar 97,56. Berikut perbandingan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya :

Tabel 3.52 Perbandingan realisasi kinerja indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	95 Indeks	92 Indeks	97,66 Indeks	96,77 Indeks	97,56 Indeks	96,19 Indeks

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{96,19}{97,66} \times 100 = 98,45\%$$

Dari data diatas capain Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat Tahun 2024 sebesar 96,19, hasil tersebut sedikit jauh dari target Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat sebesar 99. Berikut perbandingannya :

Tabel 3.53 Perbandingan realisasi kinerja indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Tahun 2024 dengan Renproja BNNP Papua Barat.

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2024
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	99	96,19

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.54 Tingkat efisiensi kinerja indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	98,45	83,17	15,28

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,28%.

c. Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor kegagalan pencapaian target Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BNNP Papua Barat hanya 98,45% atau dengan indeks sebesar 96,19 adalah Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam laksanakan terdapat

beberapa kendala seperti pergantian KPA dan kebijakan blokir perjalanan dinas sehingga harus menyesuaikan kegiatan agar efektif dan efisien.

d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BNNP Papua Barat, maka upaya dan strategi ke depan adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pada BNNP Papua Barat dengan melihat pengalaman tahun 2024.

14. Indikator Kinerja : Nilai Zona Integritas BNNP Berdasarkan Penilaian Internal

Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2024 target Indikator Nilai Zona Integritas BNNP Berdasarkan Penilaian Internal BNNP Papua Barat adalah 76 (tujuh puluh enam) dan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 79,80 (tujuh puluh sembilan koma delapan puluh) dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.55 Data capaian nilai zona integritas BNNP berdasarkan penilaian internal.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Zona Integritas BNNP Berdasarkan Penilaian Internal	76 Indeks	79,80 Indeks	105%

Definisi operasional dari Nilai Zona Integritas BNNP Berdasarkan Penilaian Internal adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dimana terdapat 6 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen,

Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capain Nilai Zona Integritas BNNP Papua Barat adalah dengan melihat Pemenuhan, Reform dan Hasil dari setiap area perubahan. Berdasarkan surat Inspektur Utama BNN RI Nomor : B/658/XII/IR/IR.04.05/2024/INS perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas Berdasarkan Penilaian Internal Pada BNNP Tahun 2024 dimana BNNP Papua Barat mendapatkan nilai sebesar 79,80 di tahun 2024.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{79,80}{76} \times 100 = 105\%$$

Dari perhitungan diatas capain Nilai Zona Integritas BNNP Papua Barat Tahun 2024 sebesar 105% dari target atau dengan indeks 79,80.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian target nilai zona integritas BNNP berdasarkan penilaian internal adalah :

- 1) BNNP Papua Barat berkomitmen dalam meningkatkan Zona Integritas dengan mengacu dari capaian tahun sebelumnya sebagai pedoman;
- 2) BNNP Papua Barat berusaha memberikan pelayanan yang maksimal terhadap Masyarakat walau dengan kondisi yang terbatas.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung perubahan dan perbaikan layanan terhadap Masyarakat, Dimana kantor BNNP Papua Barat masih status kontrak ruko 2 lantai.

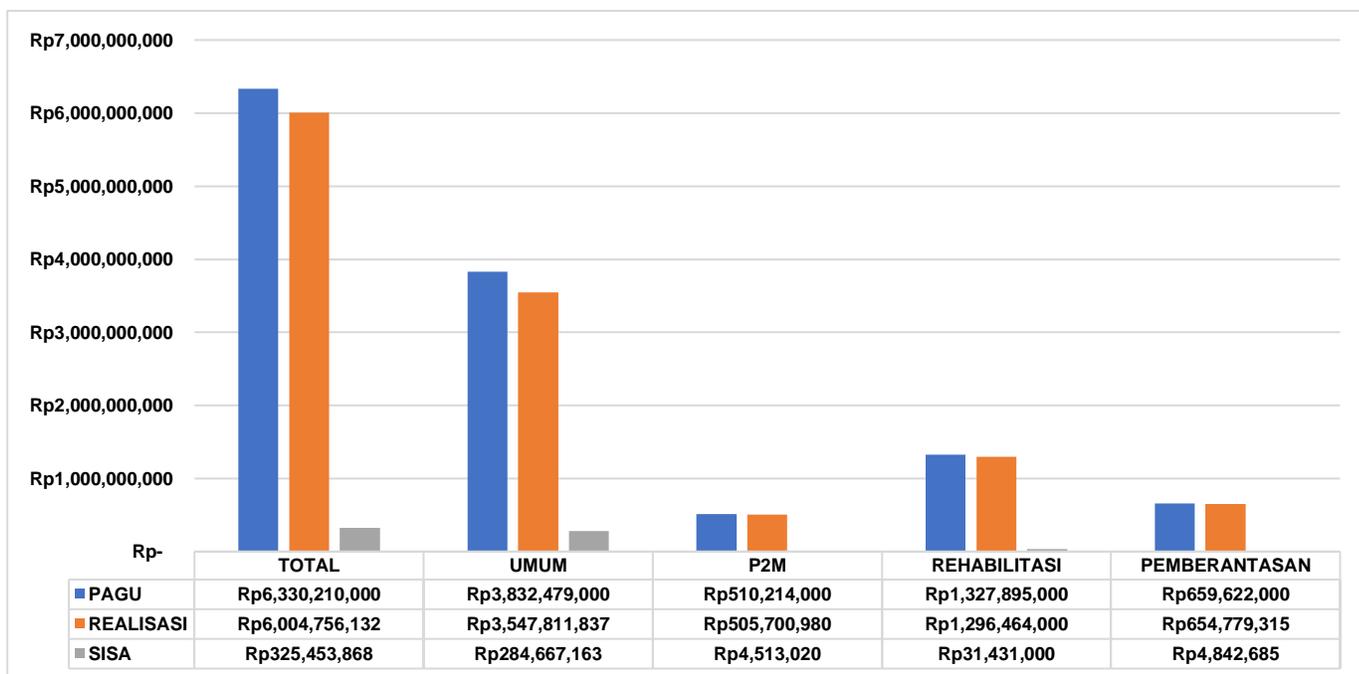
d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan nilai zona integritas BNNP berdasarkan penilaian internal, BNNP Papua Barat memaksimalkan semua sumber daya yang ada untuk terus menggenjot Zona Intgritas menuju WBBM dan WBK dengan segala keterbatasan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2024 BNNP Papua Barat mendapat total akhir alokasi anggaran **Rp6.330.210.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi keuangan **Rp6.004.756.132,- (Enam Milyar Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah)** atau sebesar 94,86% dengan sisa anggaran sebesar **Rp325.453.868,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)** atau setara dengan 5,14%. Dalam perjalanan Tahun Anggaran 2024 BNNP Papua Barat mendapatkan *Automatic Adjustment* dan Blokir Perjalanan Dinas sebesar 50% sehingga mengakibatkan BNNP Papua Barat harus melakukan efisiensi anggaran untuk dapat menunjang kegiatan di BNNP Papua Barat. Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran BNNP Papua Barat dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.3 Data Pagu dan Realisasi Anggaran BNNP Papua Barat Tahun 2024



Tabel 3.56 Data Realisasi Anggaran BNNP Papua Barat Tahun 2024

KODE	RINCIAN OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
TOTAL ANGGARAN		6,330,210,000	6,004,756,132	325,453,868	94.86%
BAGIAN UMUM		3,832,479,000	3,547,811,837	284,667,163	92.57%
3236.EBA.994	Layanan Perkantoran	1,388,466,000	1,154,707,811	233,758,189	83.16%
3236.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	216,000	216,000	-	100.00%
3237.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	21,950,000	18,600,000	3,350,000	84.74%
3238.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,431,000	4,425,000	6,000	99.86%
3239.EBA.995	Layanan BMN	10,880,000	-	10,880,000	0.00%
3239.EBA.962	Layanan Umum	350,655,000	338,956,000	11,699,000	96.66%
3239.EBA.994	Layanan Perkantoran	2,038,368,000	2,018,844,026	19,523,974	99.04%
3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	17,513,000	12,063,000	5,450,000	68.88%
BIDANG P2M		510,214,000	505,700,980	4,513,020	99.12%
3247.QDE.002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	35,700,000	35,700,000	-	100.00%
3247.UBB.001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa	66,310,000	66,310,000	-	100.00%
3257.QDB.001	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	237,904,000	236,455,980	1,448,020	99.39%
5936.QDB.001	SMP dan SMU Sederajat Yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill	170,300,000	167,235,000	3,065,000	98.20%
BIDANG REHABILITASI		1,327,895,000	1,296,464,000	31,431,000	97.63%
3256.BAA.001	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	31,192,000	31,192,000	-	100.00%
3259.PDG.001	Agen Pemulihan Yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	13,255,000	11,755,000	1,500,000	88.68%
3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	33,913,000	33,913,000	-	100.00%
3260.BAA.003	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	1,160,000,000	1,130,069,000	29,931,000	97.42%
3260.BDB.001	Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional	45,085,000	45,085,000	-	100.00%
3260.QDB.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang Operasional	44,450,000	44,450,000	-	100.00%
BIDANG PEMBERANTASAN		659,622,000	654,779,315	4,842,685	99.27%
3251.BKA.002	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	75,000,000	74,985,780	14,220	99.98%
3258.BAA.002	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	31,400,000	26,660,000	4,740,000	84.90%
3258.BIA.002	Layanan Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-narkotika	50,000,000	50,000,000	-	100.00%
3258.BIB.002	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU	30,524,000	30,524,000	-	100.00%
5354.BCA.002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	472,698,000	472,609,535	88,465	99.98%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun 2024 menyajikan hasil dari capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
- Hasil pengukuran kinerja indikator kinerja kegiatan (IKK) menunjukkan sebagian besar indikator pada IKK telah tercapai bahkan ada beberapa indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan. Meskipun demikian masih ada indikator kinerja yang pencapaiannya belum maksimal, namun dengan segala keterbatasan yang ada telah dilakukan berbagai upaya optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Tahun Anggaran 2024 dari 14 target indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 13 indikator dapat mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- Realisasi anggaran BNNP Papua Barat mencapai **Rp6.004.756.132,-** atau 94,86% dengan sisa anggaran sebesar **Rp325.453.868,-** atau setara dengan 5,14% anggaran tidak terserap.

B. Saran dan Harapan

- Penguatan Personil BNNP Papua Barat dengan penambahan Pegawai PNS/Polisi/TNI agar mendekati jumlah minimal pegawai sesuai DSP, serta pengembangan SDM yang ada di BNNP Papua Barat dengan meningkatkan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan kepada Personel/staf untuk mencapai kerja yang Profesional.
- Mengoptimalkan Koordinasi, dukungan, dan peran aktif stakeholder dan masyarakat dalam program P4GN di Provinsi Papua Barat.
- Meningkatkan kerjasama dan peran aktif media-media lokal dan nasional untuk membantu mensosialisasikan bahaya narkoba di masyarakat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : HASIL PERHITUNGAN DEKTARI DEPUTI PENCEGAHAN BNN RI TAHUN 2024



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

di
Tempat

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XII/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut :

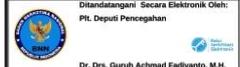
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
- Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
- Hasil penghitungan terlampir.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Ptl. Deputi Pencegahan



Dr. Drs. Guruh Achmad Fadyanto, M.H.

Tembusan :
1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT Ptl. Deputi Pencegahan
NOMOR :
B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
TANGGAL : 24 Desember 2024

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Ptl. Deputi Pencegahan



Dr. Drs. Guruh Achmad Fadyanto, M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN II : HASIL PERHITUNGAN DEKTARA DEPUTI PENCEGAHAN BNN RI TAHUN 2024



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN Jakarta, 23 Desember 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Kepada
Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di
Tempat

1. Rujukan :
a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
c. Peraturan Badan Narkotika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

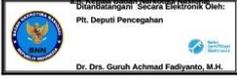
b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

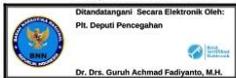
Dr. Drs. Guruh Achmad Fadlyanto, M.H.

Tembusan :
1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI

Dr. Drs. Guruh Achmad Fadlyanto, M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN III : HASIL PERHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN RI TAHUN 2024



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada
Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di tempat

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.




a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Deputi Pemberdayaan Masyarakat
Drs. Heri Maryadi, M.M.

Tembusan :
1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
198	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
199	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
200	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
201	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
202	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
203	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
204	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
205	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
206	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
207	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN IV : HASIL EVALUASI OPERASIONAL UNIT IBM TAHUN 2024

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)
Jl. MT. Heryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telp: (62-21) 80871596, 80871562
Faksimili: (62-21) 80865225, 80871591, 80871590, 80871593
e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor : B/4244/XI/DIRH.02.03/2024/BNN
Klasifikasi : Binnak
Lampiran : 9 (sembilan) berkas
Penihal : Pembertahanan Hasil Evaluasi Operasionalisasi Unit IBM TA. 2024

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada
Yth: **1. Para Kepala BNN Provinsi Seluruh Indonesia**
2. Para Kepala BNN Kabupaten Kota Seluruh Indonesia

di
Tempat :

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/2738/DIRH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahap Pertama TA. 2024;
- Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/9331/DIRH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahap Kedua TA. 2024;
- Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/9009/VI/DIRH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga TA. 2024;
- Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2024.

- 2 -

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala Badan Direktorat Pengutan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 418 unit IBM pada bulan Desember 2024. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi capaian program, faktor pendukung serta penghambat implementasi program IBM sebagai dasar dalam menentukan kebijakan di tahun anggaran 2025.

3. Hasil evaluasi operasionalisasi unit IBM sebagai berikut (data terlampir):

- Capaian fase perkembangan unit IBM
 - Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota serta telah bakti dukungan pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM, diperoleh capaian fase perkembangan unit IBM sebagai berikut:
 - Sebanyak 99 unit IBM (23,68%) memenuhi indikator fase Prima
 - Sebanyak 221 unit IBM (52,97%) memenuhi indikator fase Tangguh
 - Sebanyak 49 unit IBM (11,72%) memenuhi indikator fase Berkembang
 - Sebanyak 32 unit IBM (7,66%) memenuhi indikator fase Tumbuh
 - Sebanyak 15 unit IBM (3,59%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase

Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 401 unit (95,93%). Unit IBM diabet operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh, dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi. Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), serta AP telah dapat memenui kemas dan berhasil m enjangkau klien untuk dilakukan skrining dengan menggunakan formulir DAST-10 (Drug Abuse Screening Test) untuk selanjutnya kemudian klien diberikan layanan in tervensi hingga bisa lanjut.

- 3 -

b. Gambaran kegiatan IBM
Kegiatan IBM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh AP di luar kegiatan layanan pemulihan, meliputi sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan. Idealnya, kegiatan I BM dilakukan pada awal program dengan melibatkan masyarakat dan para pemeran klu kepentingan lainnya sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami manfaat dan memberikan kontribusi dalam menajukan program IBM. AP dalam m elakukan kegiatan IBM senantiasa mememken pendampingan intensif dari petugas s BNNP & BNNK/ Kota. Dari hasil evaluasi di Tahun 2024 ini AP telah melakukan s osialisasi IBM sebanyak 3.277 kali kepada 73.749 audiens, pemetaan 1.330 kali, d an penjangkauan dilakukan kepada 3.073 orang.

c. Gambaran layanan IBM
Layanan intervensi IBM adalah rangkaian kegiatan yang diberikan oleh AP kepada klien IBM mulai dari skrining, penerimaan awal, layanan intervensi wajib dan pilihan serta layanan bisa lanjut. Layanan IBM di berikan oleh AP kepada klien tidak terlep as dari pembinaan dan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota secara kompr ehensif serta keterlibatan keluarga dan/ atau orang terdekat dalam upaya pemulha n dan pemantauan terhadap klien. Pada Tahun 2024 tercatat keterlibatan anggota keluarga/ orang terdekat dalam layanan IBM sejumlah 1.819 orang yang terdiri dari orang tua, kakak, adik, suami/ istri, paman/ bibi atau guru sebagai wali murid di sek olah, walaupun terlapat beberapa klien IBM yang memilih untuk tidak melibatkan k eluarga dengan alasan takut, malu, ataupun berdomisili jauh dari keluarga.

d. Gambaran profil klien IBM
Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2024 sebanyak 2.310 orang dengan profil berikut:

- Mayoritas klien merupakan hasil penjangkauan AP yaitu 98,40% (2.273 orang)
- Sebanyak 93,00% (2.160 orang) klien bergeser ketaman laki-laki, dan kebanyaka n dalam kelompok usia 17-25 tahun (30,01%) dan 26-35 tahun (26,36%)

- 4 -

- Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (53,12%), mayoritas bekerja sebagai buruh/ petani/ nelayan/ pekebun (35,19%) dan pelajar/ mahasiswa (25,19%)

- Jenis zat yang paling banyak disalahgunakan adalah sabu (34,88%), sedatif h ipnotik (9,71%) dan kanabis (8,70%)

e. Gambaran Agen Pemulihan
Agen Pemulihan (AP) merupakan anggota masyarakat yang tinggal di desa/ kelurahan yang dipilih oleh Kepala Desa/ Lurah untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM setelah mendapatkan pembinaan sebagai mitra kerja BNN. AP yang ditunjuk biasanya merupakan orang-orang yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan desa/ kelurahan, sehingga telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Jumlah AP pada tahun 2024 ini terlapor sebanyak 2.210 orang, dengan berbagai latar belakang umur masyarakat yang berbedabeda, mayoritas adalah laki-laki dan berasal dari unsur tokoh masyarakat (29,50%).

f. Gambaran pendanaan mandiri unit IBM
Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 115 unit IBM (27,51%) telah memperoleh pend anan mandiri untuk operasional unit IBM serta pelaksanaan kegiatan & layanan. P endanaan mandiri ini merupakan hasil sosialisasi, koordinasi dan advokasi yang di lakukan oleh AP dengan pendampingan serta pembinaan penitl petugas BNNP & BNNK/ Kota. Dukungan dana diperoleh dari desa, kelurahan, OPD, luran/ sumbang an/ desa/ dari atau CSR dengan rentang nilai mulai dari Rp 875.000,- sampai de ngan Rp 172.133.000,-.

g. Hasil survey kebermanfaatn program IBM terhadap lingkungan & Masyarakat
Dalam rangka mengetahui dampak kegiatan IBM serta kebermanfaatnnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, Direktorat Pengutan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat melalui petugas BNNP & BNNK/ Kota melakukan survey berupa penyebaran pengisian kuesioner dengan menggunakan skala Likert pemberian skor 0-4.

- 5 -

survey di lakukan terhadap 4.111 orang responden yang merupakan anggota masyarakat non AP di wilayah desa/ kelurahan. Mayoritas responden berada dalam kelompok usia 36-45 tahun (27,66%), pekerjaan warga masyarakat yang berdomisil di sekitar lokasi IBM (72,38%). Berdasarkan hasil survey yang telah di lakukan tercatat bahwa mayoritas responden (92,26%) telah mengetahui keberadaan IBM di wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, dari pertanyaa n 1-6 dalam survey diperoleh skor rata-rata di dari total pemberian skor 0-4 yang berarti bahwa IBM dapat memberikan dampak sangat positif dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkotika.

h. Identifikasi faktor pendukung & penghambat implementasi program IBM
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor pendukung keberhasilan program IBM y ang harus dijangkakan, dan faktor penghambat yang harus diantisipasi agar dap at diatasi, beberapa faktor pendukung & faktor penghambat yang dikategorikan ses uai dengan pelaksanaan program IBM, diantaranya adalah:

- Petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota
- Agen Pemulihan (AP)
- Kepala Desa/ Lurah

4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/ Kota atas implementasi program IBM tahun 2024. Dengan kinerja pada tahun 2024 dalam melakukan pemetaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) di IBM dapat diimplikasikan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

5. Demikian untuk menjadi maklum.




 Ditandatangani: **Seren Endriani Olih,**
 Pl. Deputi Rehabilitasi

Dit. di: Field Amarah, Su.PT

No.	Provinsi	BNNP/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Gunung Selapan	Selapan	Kota Mataram
214	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Ayala Timur	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
215	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Ayala Timur	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
216	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Tabulo	Mananga	Kabupaten Boalemo
217	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Wungga	Pegayaman	Kabupaten Boalemo
218	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Buldo	Kota Barat	Kota Gorontalo
219	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tomuturua	Dungingi	Kota Gorontalo
220	Papua Barat	BNNP NABAL BARAT	Kampung Almasi	Dindik Puli	Kabupaten Mandar
221	Papua Barat	BNNP NABAL BARAT	Kelurahan Mandawari	Kecamatan Mandawari	Kabupaten Mandawari
Berkembang (49 unit)					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tandi Sutar	Ditak Tarah Cidar	Kabupaten Batu Bara
2	Sumatera Utara	BNN Kab. Ogan Ilir Selatan	Desa Tanjung Saja	Tanjung Saja	Kabupaten Ogan Ilir
3	Sumatera Utara	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Jena Kanan II	Lubalingsgau Timur II	Kota Lubalingsgau
4	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lintang	Desa Tanjung Lintang	Muaru Pinang Empat Lintang	Kabupaten Empat Lintang
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muar Rawas	Desa Ibra Tanjung Rawas	Tuah Negeri	Kabupaten Muar Rawas
6	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muar Rawas	Desa Sumbur Arai	Sumbur Harta	Kabupaten Muar Rawas
7	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Mualan Bahau	Sipahi	Kabupaten Ogan Komering Ilir
8	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Calabai	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
9	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Desa Lendah	Goting	Kabupaten Tanggamus
10	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Daun Tengah	Segini	Kabupaten Bengkulu Selatan
11	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Tanggi-Raso	Piso Raso	Kabupaten Bengkulu Selatan
12	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Cempaka Putih	Ciputat Timur	Kota Tangerang Selatan
13	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Selatan	Desa Hegmanah Juhangur	Juhangur	Kabupaten Bandung Selatan
14	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Selatan	Desa Cipakar	Pemulihan	Kabupaten Bandung Selatan
15	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Sekeloa Lama	Singkawang Tengah	Kota Singkawang

- 6 -

No.	Provinsi	Capaian Fase Perkembangan Tahun 2024				
		Pra Fase	Berkembang	Tumbuh	Tangguh	Prima
1	1	2	4	3	6	8
23	Maluku Utara	2	0	3	0	3
29	Bali	0	2	4	2	4
30	NTB	0	0	0	6	2
31	NTT	0	2	3	3	0
32	Gorontalo	0	0	4	2	6
33	Papua	0	1	2	3	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	2




 Ditandatangani: **Seren Endriani Olih,**
 Pl. Deputi Rehabilitasi

Dit. di: Field Amarah, Su.PT

LAMPIRAN V : INDEKS KEPUASAN LAYANAN KLINIK REHABILITASI DAN PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP TAHUN 2024



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885226, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR, IKM dan Presentase Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada
Yth. **Daftar terlampir**
di
Tempat

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP, 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Rehabilitasi BNN;
- Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR), pengukuran Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) dan Presentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja bidang Rehabilitasi dengan hasil sebagaimana terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala untuk dapat menjadikan hasil dimaksud sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja dan peningkatan kualitas bidang rehabilitasi mendatang di wilayah beserta jajaran.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.




Tembusan :
1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

Papua Barat	3.66	354	100.00
Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido	4	354	76.99
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	4	353	83.11
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	4	365	67.97
Loka Rehabilitasi BNN Batam	4	376	85.76
Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	3.81	364	89.25
Loka Rehabilitasi BNN Kalanda	4	369	63.69




Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN VI : PENYAMPAIAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA NILAI ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN PENILAIAN INTERNAL PADA BNNP TAHUN 2024



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)
 Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
 Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
 e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/658/XIII/IR/04.05/2024/INS Jakarta, 30 Desember 2024
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : 1
 Perihal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas Berdasarkan Penilaian Internal Pada BNNP Tahun 2024

Kepada
 Yth. Para Kepala BNNP
 di tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, capaian indikator kinerja kegiatan Nilai Zona Integritas berdasarkan penilaian internal untuk BNNP Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir dua, diperintahkan kepada Kepala BNNP agar terus meningkatkan kualitas Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

menjadikan capaian tahun 2024 sebagai acuan penentuan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BNNP Tahun 2025.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Inspektur Utama BNN



Drs. Wahyono, M.H., CFIA, CCACAE.

Tembusan :
 Sekretaris Utama BNN

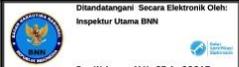
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT Inspektur Utama BNN
 NOMOR : B/658/XIII/IR/04.05/2024/INS
 TANGGAL : 30 Desember 2024

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
27	BNNP Jambi	32.60	35.97	68.57
28	BNNP Nusa Tenggara Timur	32.72	35.49	68.21
29	BNNP Kalimantan Utara	32.25	35.62	67.87
30	BNNP Bengkulu	43.83	22.50	66.33
31	BNNP Gorontalo	29.66	34.38	64.04
32	BNNP Maluku Utara	37.63	16.88	54.51
33	BNNP Papua	35.60	17.00	52.60
34	BNNP Sulawesi Tengah	31.25	1.25	32.50



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Inspektur Utama BNN



Drs. Wahyono, M.H., CFIA, CCACAE.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.